KINERJA DINAS SOSIAL DAN DINAS KESEHATAN DALAM PENURUNAN PREVALENSI ANGKA STUNTING DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Muhammad Fathan Ghazy Abrar
NPP. 33.0201
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: fathanega6@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, MM., M.Si
Email: dwi141263@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement: *Based on data from the 2023 SKI Survey, Merangin Regency has a high number ofprevalence of stunting14.9%. This figure falls into the moderate category, between 10-15%, indicating that significant challenges remain in efforts to reduce stunting rates in this region. Compared to other regencies/cities in Jambi Province, this figure is higher than several regions, such as Sungai Penuh City (4.1%), Sarolangun City (4.8%), and Kerinci (8.7%), which have stunting rates below 10%. This fact indicates that although Merangin Regency has not yet achieved a stunting rate below 10%, this region is already in a better position than several other areas in the province that face high stunting prevalence. However, Merangin Regency needs to continue to improve health, nutrition, and education interventions to further reduce stunting rates, approaching or below the national target.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the performance quality of both institutions in addressing stunting.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through in-depth interviews with key informants, as well as through observation and documentation. Data analysis was conducted based on public organizational performance dimensions, including productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability.* ***Results:*** *The results show that the performance quality of both institutions is relatively good. This is reflected in program productivity that runs according to plans, improved service quality, and responsiveness in addressing community needs related to stunting. In addition, the implementation of duties demonstrates responsibility and accountability in accordance with applicable regulations.* ***Conclusion:*** *Overall, both institutions demonstrate integrated performance in supporting the acceleration of stunting reduction in Merangin Regency.*

Keywords: Health Office, Performance, Social Service, Stunting

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Berdasarkan data dari Survei SKI tahun 2023, Kabupaten Merangin memiliki angka *prevalensi stunting* sebesar 14,9%. Angka ini termasuk

dalam kategori sedang, yaitu antara 10-15%, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah ini. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi, angka ini lebih tinggi dari beberapa daerah seperti Kota Sungai Penuh (4,1%), Kota Sarolangun (4,8%), dan Kerinci (8,7%) yang memiliki angka stunting di bawah 10%. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Merangin belum mencapai angka stunting di bawah 10%, wilayah ini sudah berada pada posisi yang lebih baik dibanding beberapa daerah lain di provinsi yang menghadapi prevalensi stunting tinggi. Namun demikian, Kabupaten Merangin perlu terus meningkatkan upaya intervensi kesehatan, gizi, dan pendidikan agar dapat menurunkan angka stunting lebih jauh, mendekati atau di bawah target nasional. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, serta melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada dimensi kinerja organisasi publik yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja kedua instansi tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari produktivitas program yang berjalan sesuai dengan perencanaan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta responsivitas dalam menanggapi kebutuhan masyarakat terkait stunting. Selain itu, pelaksanaan tugas menunjukkan adanya responsibilitas dan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Kesimpulan:** Secara keseluruhan, kedua instansi menunjukkan kinerja yang terintegrasi dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Merangin.
Kata Kunci: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kinerja, *Stunting*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah stunting masih menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat (Ripa'i, 2018). Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, *prevalensi stunting* di Indonesia tercatat sebesar 21,6%. Angka ini menunjukkan penurunan dari 24,4% pada tahun 2021, tetapi angka 21,6% tersebut masih berada di atas batas toleransi yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20% (Ali dkk., 2026). Hal ini menegaskan bahwa Indonesia masih termasuk dalam kategori negara dengan beban stunting yang tinggi atau "*high burden*". Berdasarkan data dari SKI pada tahun 2023, angka stunting di Provinsi Jambi pada tahun 2023 tercatat sebesar 13,5%. Angka ini menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Jambi sudah relatif rendah dibandingkan dengan banyak provinsi lain di Indonesia, terutama provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Timur yang memiliki angka stunting sangat tinggi (misalnya Papua Tengah 39,4%, Nusa Tenggara Timur 37,9%, dan Papua Timur 37,3%) (Fauzi, 2025). Jambi bahkan berada jauh di bawah angka nasional yang sebesar 21,5%. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibanding Bali (7,2%), sehingga perlu terus dijaga dan diturunkan lebih jauh lagi agar memperbaiki status gizi dan tumbuh kembang anak secara optimal di Provinsi Jambi. Secara umum, posisi Jambi dalam grafik ini menggambarkan kondisi cukup baik dalam penanganan stunting jika dibandingkan dengan sebagian besar provinsi di Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan (Giyarsih dkk., 2026).

Pemerintah Provinsi Jambi mengoptimalkan berbagai program strategis yang melibatkan sinergi antar sektor serta keterlibatan dunia usaha melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program seperti "Bapak Asuh Anak Stunting" yang melibatkan unsur TNI, Polri, ASN, dan stakeholder lainnya telah memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan prevalensi stunting (Lelono & Rahmadanita, 2023). Program ini fokus pada edukasi pola asuh dan pemberian makanan bergizi bagi anak-anak terindikasi stunting sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup anak. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan, *prevalensi stunting* yang masih di atas batas toleransi WHO menandakan bahwa upaya penurunan stunting di Provinsi Jambi harus terus dipacu dan diintensifkan (Mulianingsih & Lubis, 2018). Hal ini memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai stakeholder dan pendekatan yang konvergen agar intervensi lebih efektif, tepat sasaran, serta berdampak nyata dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terutama anak-anak di Jambi (Pasli, 2024). Masalah stunting di provinsi Jambi ini tentunya dipengaruhi oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jambi, salah satunya Kabupaten Merangin (Paembonan dkk., 2025).

Masalah stunting di Kabupaten Merangin saat ini menjadi fokus perhatian yang sangat penting, terutama berkaitan dengan kinerja dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang menjadi aktor penting penurunan stunting (Salleh dkk., 2026). Berdasarkan data dari Survei SKI tahun 2023, Kabupaten Merangin memiliki angka *prevalensi stunting* sebesar 14,9%. Angka ini termasuk dalam kategori sedang, yaitu antara 10-15%, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah ini. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi, angka ini lebih tinggi dari beberapa daerah seperti Kota Sungai Penuh (4,1%), Kota Sarolangun (4,8%), dan Kerinci (8,7%) yang memiliki angka stunting di bawah 10%. Namun, prevalensi stunting di Merangin masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Tebo (22,7%) dan Tanjung Jabung Timur (23,7%) yang masuk kategori tinggi (>15%) (Tewachew & Minale, 2026). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Merangin belum mencapai angka stunting di bawah 10%, wilayah ini sudah berada pada posisi yang lebih baik dibanding beberapa daerah lain di provinsi yang menghadapi prevalensi stunting tinggi. Namun demikian, Kabupaten Merangin perlu terus meningkatkan upaya intervensi kesehatan, gizi, dan pendidikan agar dapat menurunkan angka stunting lebih jauh, mendekati atau di bawah target nasional (Soesanto, 2019).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa masalah stunting bukan sekadar isu kesehatan yang berkaitan dengan kekurangan gizi pada anak, tetapi merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, akses layanan publik, serta tata kelola program pemerintah (Nugroho et al., 2023). Kompleksitas faktor penyebab ini menegaskan bahwa stunting tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan medis, melainkan sebagai problem pembangunan manusia secara menyeluruh. Rumah tangga yang hidup dalam kondisi kemiskinan, memiliki keterbatasan akses terhadap sanitasi dan air bersih, serta pengetahuan gizi yang rendah sering kali lebih berisiko melahirkan anak stunting karena aspek-aspek tersebut saling berinteraksi dan memperburuk situasi gizi anak. Oleh karena itu, upaya pencegahannya harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan lintas sektor dan berbagai pemangku kepentingan (Putri & Adiyani, 2018).

Dalam konteks ini, pendekatan multisektoral menjadi suatu keharusan. Pendekatan tersebut menekankan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting bergantung pada koordinasi antara sektor kesehatan, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan (Rantini dkk., 2025). Berbagai sektor ini memiliki kontribusi masing-masing dalam menyediakan intervensi yang bersifat spesifik maupun sensitif terhadap pencegahan stunting. Intervensi spesifik adalah intervensi yang berhubungan langsung dengan perbaikan status gizi ibu dan anak, seperti pemenuhan asupan gizi, imunisasi lengkap, pemantauan tumbuh kembang, serta layanan kesehatan ibu hamil. Sementara itu, intervensi sensitif mencakup upaya menciptakan lingkungan sosial-ekonomi yang mendukung status gizi, misalnya penyediaan sanitasi layak, air bersih, pendidikan, perlindungan sosial, dan upaya pengentasan kemiskinan. Kedua jenis intervensi ini tidak dapat dipisahkan karena saling menguatkan dalam menurunkan prevalensi stunting.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam upaya penurunan prevalensi angka stunting. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Merangin akan kesulitan dalam menganalisis bagaimana kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan serta hambatan yang terjadi sehingga penurunan prevalensi angka stunting di Kabupaten Merangin menjadi tidak optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dirancang untuk menyajikan temuan-temuan dari tulisan-tulisan terdahulu yang telah diselesaikan oleh peneliti dan disajikan dengan cara yang mencakup argumentasi. Lebih jauh lagi, hasil-hasil tulisan yang disajikan memiliki hubungan yang signifikan dengan tema tulisan yang dipilih oleh peneliti. Febrianto dkk. (2022) menyoroti pentingnya kualitas kinerja tenaga kesehatan dalam mendeteksi kasus stunting secara dini, menunjukkan bahwa kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan pengukuran antropometri, memahami prosedur deteksi stunting, serta melakukan pencatatan dan pelaporan data secara akurat berpengaruh langsung terhadap jumlah kasus yang berhasil ditemukan. Selanjutnya, Charisa dkk. (2025) menguraikan bagaimana kontribusi Dinas Kesehatan menjadi komponen utama dalam percepatan penurunan stunting di tingkat daerah dan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki peran strategis melalui pelaksanaan intervensi gizi spesifik, seperti pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian vitamin dan suplementasi gizi, peningkatan kualitas pelayanan di posyandu, serta edukasi kesehatan kepada ibu hamil dan keluarga balita. Wididiati dkk. (2022) mengkaji bagaimana kebijakan penanganan stunting dilaksanakan di tingkat desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dan menemukan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi di tingkat lokal. Fathia dkk. (2023) membahas bagaimana Dinas Kesehatan menjalankan berbagai program gizi untuk menurunkan angka stunting di daerah tersebut dan menemukan bahwa implementasi program gizi mencakup beberapa kegiatan utama, seperti pemantauan status gizi balita melalui posyandu, pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, edukasi gizi seimbang, serta penyediaan makanan tambahan bagi balita berisiko stunting. Anni Riwayati (2024) mengkaji

berbagai strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya. Penelitian ini menyoroti tiga strategi utama, yaitu penguatan intervensi gizi spesifik, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta koordinasi lintas sektor. Dinas Kesehatan berfokus pada pemantauan pertumbuhan balita, pemberian suplementasi gizi, peningkatan peran posyandu, dan edukasi intensif kepada ibu hamil serta keluarga balita.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Secara teoretis, penelitian ini berbeda dengan penelitian Febrianto et al. (2022) yang berfokus pada kinerja petugas kesehatan dalam menemukan kasus baru stunting pada balita. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kemampuan teknis tenaga kesehatan dalam pengukuran antropometri, pencatatan, dan pelaporan kasus stunting, sedangkan penelitian ini menganalisis kinerja organisasi secara lebih luas dengan menilai peran kelembagaan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagai organisasi publik dalam melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Penelitian ini juga berbeda dengan Kharisa et al. (2025) yang mengkaji peran Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur. Fokus penelitian tersebut hanya menyoroti satu organisasi perangkat daerah, sedangkan penelitian ini mengkaji secara simultan kinerja dua organisasi, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, sehingga mampu menjelaskan keterpaduan intervensi kesehatan dan sosial dalam upaya percepatan penurunan stunting. Berbeda pula dengan penelitian Wididiati et al. (2022) yang menggunakan perspektif implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Fokus penelitian tersebut berada pada pelaksanaan kebijakan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengukuran kinerja organisasi pelaksana kebijakan berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat apakah kebijakan dilaksanakan, tetapi juga bagaimana kualitas kinerja organisasi yang menjalankannya.

Selanjutnya, penelitian ini berbeda dengan Fathia et al. (2023) yang meneliti implementasi program gizi oleh Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut berorientasi pada pelaksanaan program gizi sebagai bentuk intervensi spesifik, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Kesehatan dan intervensi sensitif yang dilakukan Dinas Sosial. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penanganan stunting yang bersifat multidimensi. Perbedaan juga terlihat dengan penelitian Anny Riwayati (2024) yang berfokus pada strategi penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Penelitian tersebut menitikberatkan pada strategi organisasi, sedangkan penelitian ini mengevaluasi kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh melalui indikator-indikator kinerja sektor publik.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

II. METODE PENELITIAN

Proses pendekatan penelitian merupatan sebuah fondasi bagi penulis dalam menyusun suatu penelitian.penelitian itu sendiri merupakan kegiatan mencari data dan informasi dengan menggunakan metode tertentu untuk menyelesaikan masalah agar tercapai tujuan sesuai kaidah ilmiah. Pendekatan yang akan penulis gunakan pada studi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode induktif. Pendekatan penelitian kualitatif dalam pelaksanaanya, memerlukan beberapa tahapan yakni pengumpulan data, pencarian data, dan analisis data yang di lakukan secara faktual sesuai dengan situasi yang ada dilapangan. Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang sudah dirasa sangat cocok untuk penelitian ini. Hal tersebut di sebabkan agar peneliti bisa melaksanakan observasi secara detail dan rinci hal tersebut dalam memberikan data yang akurat yang mendeskripsikan mengenai fakta – fakta sesuai dengan phenomena di lapangan. Setelah memperoleh data tersebut peneliti akan melakukan analisis terhadap data tersebut yang menjelaskan tentang fenomena sehingga peneliti dapat memperoleh sebuah gambaran terkait kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Sumber data yang peneliti akan gunakan yaitu seluruhnya data yang bersifat kualitatif yaitu data yang berbentuk kata – kata dilengkapi dengan dokumen dan lain – lainnya. Peneliti dapat mendapatkan sumber data primer secara langsung dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Merangin dengan cara melakukan wawancara dan observasi melalui proses meneliti dan memantau serta memperhatikan langsung kejadian – kejadian yang ada di lapangan. Untuk data skunder peneliti sebagai tangan kedua yaitu peneliti mendapatkan data melalui proses mencari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain – lainnya. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan pihak atau sumber informan yang dianggap paling paham permasalahan di lapangan dan memiliki peran penting dalam suatu instansi atau organisasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi.

Selanjutnya, Analisis data yang peneliti lakukan menggunakan Nvivo 12. Nvivo merupakan software untuk menunjang pengembangan, dan manajemen analisis data dalam penelitian kualitatif dengan fungsi utamanya adalah untuk melakukan koding data dengan efektif dan efisien. Menurut Priyatni, analisis data dengan menggunakan Nvivo yang menerapkan sistem koding dan analisis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber data akan memisahkan data yang bersumber dari peneliti, dari informan, sumber data sekunder (buku, laporan hasil penelitian, artikel jurnal dan sebagainya Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) impor data/sumber data, yakni (Data yang diperoleh dari berbagai sumber data akan dilakukan pengimporan data ke dalam Nvivo); (2) *Coding data,* merupakan Proses koding data dilakukan dengan membaca data secara intens serta mengklasifikasikannya, guna mendapatkan koding data yang sesuai dengan kriteria; (3) *Coding comparison*; (4) *comparison diagram*, adalah pada tahapan ini digunakan untuk membandingkan antara dua hasil Coding dengan menggunakan fitur comparison diagram; (5) *Hierarchy Chart*, adalah tahap yang ditujukan untuk mengamati kecenderungan hasil dari proses sebelumnya atau analisis yang telah dilakukan. Adapun cara pengolahan data tersebut yaitu dengan menggunakan fitur Explore dan Run Query; (6) penyajian hasil; dan (7) penarikan kesimpulan. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu menggunakan teknik triangulasi dalam

membandingkan dari setiap sumber data itu didapatkan baik dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan guna mencapai nilai keakuratan yang tinggi baik dari segi kebenaran data yang telah diperoleh dan juga tentunya mempermudah pemahaman untuk peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selama tiga minggu mulai dari tanggal 5 Januari 2026-25 Januari 2026, yang mencakup proses pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, observasi, dan mengalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kualitas Kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam Penurunan Stunting

Penelitian ini menganalisis kualitas kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam upaya penurunan stunting menggunakan perspektif kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto yang meliputi lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Analisis data kualitatif menunjukkan bahwa kedua instansi telah menjalankan peran yang cukup baik dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas menjadi aspek yang paling menonjol, sedangkan produktivitas dan akuntabilitas masih menghadapi beberapa kendala yang memerlukan perbaikan. Secara umum, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan intervensi kesehatan dan sosial, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, membangun hubungan dengan masyarakat, serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program secara transparan.

3.1.1. Produktivitas

Pada dimensi produktivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui perencanaan berbasis kebutuhan dan prioritas program. Anggaran, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta sarana pendukung dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung intervensi sensitif maupun spesifik dalam penanganan stunting. Namun demikian, produktivitas organisasi belum sepenuhnya optimal karena cakupan layanan masih belum merata, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis. Selain itu, dampak program terhadap penurunan prevalensi stunting belum menunjukkan hasil yang signifikan secara menyeluruh. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga, sarana prasarana, serta faktor sosial ekonomi masyarakat yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, meskipun efisiensi pengelolaan sumber daya sudah berjalan baik, efektivitas hasil akhir program masih perlu ditingkatkan melalui pemerataan layanan dan penguatan intervensi yang lebih terfokus pada kelompok sasaran berisiko.

3.1.2. Kualitas Layanan

Berbeda dengan dimensi produktivitas, kualitas layanan menunjukkan capaian yang sangat baik. Masyarakat menilai bahwa layanan pencegahan dan penanganan stunting relatif mudah diakses melalui keberadaan posyandu dan puskesmas yang tersebar hingga tingkat desa.

Selain itu, petugas kesehatan dinilai responsif dalam menangani kasus yang ditemukan di lapangan melalui pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan, maupun rujukan layanan lanjutan. Profesionalisme petugas juga menjadi faktor penting yang memperkuat kualitas layanan. Sikap ramah, kesabaran dalam memberikan edukasi gizi, serta kemampuan menjelaskan informasi kesehatan kepada masyarakat mendorong terbentuknya hubungan yang positif antara petugas dan penerima layanan. Kualitas pelayanan yang baik ini menjadi modal penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung keberhasilan program penurunan stunting secara berkelanjutan.

3.1.3. Responsivitas

Dimensi responsivitas juga menunjukkan hasil yang positif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Petugas tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi secara aktif melakukan pemantauan melalui kegiatan posyandu, kunjungan rumah, dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Setiap kasus yang teridentifikasi umumnya segera ditindaklanjuti melalui intervensi kesehatan maupun bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, mekanisme penyampaian keluhan masyarakat melalui kader posyandu, perangkat desa, maupun petugas lapangan telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara langsung, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, organisasi dinilai mampu membangun komunikasi yang efektif dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa responsivitas telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan program penurunan stunting di Kabupaten Merangin.

3.1.4. Responsibilitas

Pada dimensi responsibilitas, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan ketentuan administratif, standar operasional prosedur, serta kebijakan yang berlaku. Setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar hukum dan pedoman teknis yang jelas, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program penurunan stunting juga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan rutin seperti pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan posyandu, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi berkala. Meskipun demikian, aspek ketepatan waktu masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan akibat keterbatasan tenaga pelaksana, kondisi geografis, maupun faktor cuaca yang memengaruhi akses layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen pelaksanaan program agar kegiatan dapat berlangsung lebih tepat waktu tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

3.1.5. Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas menunjukkan bahwa kedua instansi telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas mulai dari tingkat dinas, puskesmas, hingga kader di lapangan. Pengelolaan anggaran juga dilakukan secara tertib melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat masih relatif terbatas. Informasi mengenai hasil program lebih banyak disampaikan kepada pimpinan dan instansi terkait, sedangkan masyarakat umumnya hanya memperoleh informasi melalui kegiatan lapangan atau pertemuan desa tanpa akses terhadap laporan yang lebih komprehensif. Kondisi ini

menunjukkan bahwa akuntabilitas internal organisasi telah berjalan cukup baik, tetapi akuntabilitas publik masih perlu diperkuat melalui peningkatan transparansi informasi dan publikasi hasil program secara berkala. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat program, tetapi juga dapat menjadi pihak yang memahami dan mengawasi perkembangan upaya penurunan stunting di daerahnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam upaya penurunan stunting berada pada kategori cukup baik. Keberhasilan organisasi terlihat dari kualitas pelayanan yang tinggi, responsivitas yang kuat terhadap kebutuhan masyarakat, serta kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas program dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, peningkatan pemerataan layanan, penguatan kapasitas sumber daya, optimalisasi pelaksanaan program di wilayah sulit dijangkau, serta pengembangan sistem transparansi publik menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan mempercepat pencapaian target penurunan stunting di Kabupaten Merangin.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam upaya penurunan prevalensi stunting secara umum berada pada kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program yang telah berjalan sesuai perencanaan, adanya koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta responsivitas instansi dalam menangani permasalahan stunting. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti belum optimalnya efektivitas program dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan, keterbatasan tenaga dan sarana prasarana, serta masih rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam memastikan program memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat.

Temuan penelitian ini sama halnya dengan penelitian Febrianto et al. (2022) yang menemukan bahwa keberhasilan program penanganan stunting sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja petugas kesehatan, dukungan sarana prasarana, koordinasi antarpetugas, serta pembinaan dari Dinas Kesehatan. Penelitian Febrianto menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program stunting. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Kabupaten Merangin yang menunjukkan masih adanya kendala pada pemerataan output kegiatan, keterbatasan tenaga pelaksana, serta hambatan geografis yang mempengaruhi efektivitas program. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Febrianto et al. (2022) bahwa kualitas sumber daya manusia dan dukungan organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan program penurunan stunting.

Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fathia et al. (2023) mengenai implementasi program gizi oleh Dinas Kesehatan di Kota Pekanbaru. Fathia et al. menemukan bahwa keberhasilan program gizi sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan edukasi gizi, serta keterjangkauan layanan kepada masyarakat. Dalam

penelitian ini ditemukan bahwa kualitas layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin relatif baik karena masyarakat telah memperoleh akses layanan melalui posyandu, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, serta pemberian makanan tambahan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang baik belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan prevalensi stunting secara signifikan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian Fathia et al. (2023) dengan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perlu diikuti oleh peningkatan efektivitas intervensi agar menghasilkan dampak yang lebih optimal terhadap status gizi masyarakat.

Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Kharisa et al. (2025) yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan intervensi spesifik stunting melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan gizi, imunisasi, serta edukasi kesehatan masyarakat. Penelitian di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah melaksanakan fungsi tersebut dengan cukup baik dan menjadi salah satu aktor utama dalam penurunan stunting. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru karena tidak hanya menyoroti peran Dinas Kesehatan, tetapi juga menganalisis peran Dinas Sosial melalui intervensi sensitif berupa bantuan sosial, pendampingan keluarga rentan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian Kharisa et al. (2025) yang lebih berfokus pada peran Dinas Kesehatan.

Selanjutnya, temuan penelitian ini sama halnya dengan penelitian Wididiati et al. (2022) mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting. Wididiati et al. menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian di Kabupaten Merangin menunjukkan kondisi yang serupa, yaitu adanya kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah desa, kader posyandu, dan masyarakat dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa stunting merupakan permasalahan multidimensional yang memerlukan pendekatan terintegrasi dan konvergen. Di sisi lain, terdapat temuan yang berbeda dengan penelitian Riwayati (2024) mengenai strategi penurunan stunting di Kota Pontianak. Riwayati menemukan bahwa strategi yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui dukungan sumber daya yang memadai dan sistem koordinasi yang relatif kuat. Sementara itu, penelitian di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antarinstansi telah berjalan cukup baik, efektivitas program masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, kondisi geografis wilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan pencegahan stunting. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik wilayah penelitian yang berbeda. Kota Pontianak sebagai wilayah perkotaan memiliki akses pelayanan yang lebih mudah dibandingkan Kabupaten Merangin yang memiliki wilayah geografis lebih luas dan beragam sehingga memengaruhi efektivitas implementasi program.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nugroho et al. (2023) yang menyatakan bahwa stunting merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya bergantung pada pelayanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh

kondisi ekonomi keluarga, tingkat kesadaran masyarakat, partisipasi dalam kegiatan posyandu, serta dukungan program bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat pandangan Nugroho et al. (2023) bahwa pendekatan penanganan stunting harus dilakukan secara holistik melalui kombinasi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Temuan lain yang menarik adalah terkait dimensi akuntabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa sistem pelaporan dan dokumentasi kegiatan telah berjalan dengan baik, tetapi keterbukaan informasi kepada masyarakat masih belum optimal. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek pelaksanaan program dan koordinasi, namun belum secara mendalam membahas keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap kajian kinerja organisasi publik dalam penanganan stunting, khususnya terkait pentingnya transparansi informasi sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya telah berjalan cukup baik melalui perencanaan berbasis prioritas dan kolaborasi lintas sektor. Namun, masih terdapat kendala pada pemerataan output kegiatan serta efektivitas program yang belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan sumber daya. Adapun, responsivitas instansi dalam merespons kebutuhan masyarakat terkait stunting telah terlihat melalui berbagai program intervensi dan penanganan kasus di lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan respon pada kondisi tertentu akibat keterbatasan tenaga dan tingginya beban kerja.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas pada daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada dua organisasi perangkat daerah, padahal penanganan stunting melibatkan banyak aktor lintas sektor yang turut berperan dalam percepatan penurunan stunting. Analisis juga dibatasi pada perspektif kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto, sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek lain seperti kolaborasi antarlembaga, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan dampak jangka panjang dari program penurunan stunting belum dapat diamati secara menyeluruh, sementara data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi masih berpotensi dipengaruhi oleh subjektivitas informan serta keterbatasan akses terhadap informasi tertentu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari kekurangan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai peran pemerintah dalam penanganan stunting khususnya di Kabupaten Merangin sehingga ditemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama peneliti tujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin beserta jajaran, yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A.S., Osborne, A. (2026).Trends in Stunting Prevalence and Sex-based Disparities among Children under Five in Somalia, 2000–2024: A Secondary Analysis of WHO Model-based Estimates. J Epidemiol Glob Health 16, 63 https://doi.org/10.1007/s44197-026-00579-y

Fauzi, F. Z. (2025). *The evolution of national health insurance in Indonesia: Policies, progress, and challenges*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 8(1), 67-78. https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/5559/2235

Febrianto, et al. (2022). Analisis kinerja petugas kesehatan dalam penemuan kasus baru stunting pada balita di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Kesehatan*. https://doi.org/10.32524/jksp.v5i1.386

Giyarsih, S.R., Armansyah, A., Zaelany, A.A. et al. (2026). The potential role of farmer women's groups as community-based urban farming in addressing the risk of stunting. Discov Food 6, 8. https://doi.org/10.1007/s44187-025-00728-5

Kharisa, et al. (2025). Peran Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrasi Publik*. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21016

Lelono, J., & Rahmadanita, A. (2023). *Implementasi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS): Studi pada pasien rawat jalan di BLUD RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan*. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 5(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/3118/1616

Mulianingsih, S., & Lubis, B. (2018). ANTARA PELAYANAN KTP-EL DAN MASYARAKAT UNTUK MASYARAKAT JAWA BARAT DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) 11 SD 13 APRIL 2018. *Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil)*, *6*(1), 47-65. https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/369/207

Paembonan, M. R., Ristiani, I. Y., & Supriatna, A. (2025). *Kesiapsiagaan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Konstituen, 7(2). https://doi.org/10.33701/jk.v7i2.5723

Pasli, I. (2024). *Tren global dan lokal dalam penurunan stunting: Analisis bibliometrik dari studi terpilih*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(2), 249-261. https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i2

Rantini, D., Najiyya, S. I., Ghani, M, Yasmirullah, S. D. P., Fahmiyah, I., Ramadan, A., … Alya, N. A. (2025). Understanding the Spatial Distribution of Stunting in East Java, Indonesia: A Comparison of GWR and MS-GWR Models. Statistics, Optimization & Information Computing, 15(1), 311–323. https://doi.org/10.19139/soic-2310-5070-3066

Ripa'i, A. (2018). Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi menuju single identity number di dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil)*, 67-85. https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/372/210

Salleh, R., Ahmad, M., Mohd Zaki, N.A. et al. (2026) Risk factors for stunting children in urban areas: case-control study in Putrajaya. Discov Public Health 23, 219. https://doi.org/10.1186/s12982-026-01481-5

te, H. (2019). *Akuntabilitas dalam budaya organisasi pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 9(2). file:///C:/Users/ASUS/Downloads/administrator,+7.+Herry+Soesanto.pdf

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.

Tewachew, A.A., Minale, A.S. (2026). Socio-Demographic determinants of stunting among children in the Amhara region of Ethiopia based on a secondary analysis of the EDHS. Discov Soc Sci Health 6, 21 https://doi.org/10.1007/s44155-025-00350-x

Wididiati, et al. (2022). Implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Administrasi Publik*. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/36183/27796